



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2024



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P. BUPATI GUNUNGKIDUL

JOKO PARWOTO, S.E., M.M. WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,
Saudara-saudara warga Kabupaten Gunungkidul yang saya cintai dan banggakan.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadist Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih berkesempatan untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024. Penyelenggaraan RLPPD merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada Warga Masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan RLPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian RLPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selanjutnya kami sajikan sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sejak tahun 1990, UNDP mempublikasikan IPM secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Dimensi dasar IPM meliputi Umur panjang dan hidup sehat, Penghasilan Standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS dalam Laporan Gunungkidul Dalam Angka 2024, dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat dilihat dari data angka harapan hidup. Dimensi dasar pengetahuan dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak diketahui melalui data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tahun 2024. Berdasarkan data capaian dimensi dasar dimaksud, capaian IPM Gunungkidul tahun 2024 adalah sebesar 72,14.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul

Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,91 tahun	13,40%	7,35 tahun	Rp. 10.630.000,-	72,14

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Capaian IPM Tahun 2024 dimaksudkan mengingat 0,68 poin dibandingkan kondisi tahun 2023 yang tercatat 71,46. Capaian IPM dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa IPM Tinggi, namun demikian perlu kerja keras yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi, guna mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadilan.

2. Angka Kemiskinan

Parameter peningkatan kesejahteraan secara riil dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan mendasar dalam media pendapatan rumah tangga dipengaruhi budaya kita yang kurang terbuka atau bahkan tidak bersedia memberikan informasi riil tentang Hal ini berdampak terhadap akurat data pendapatan rumah tangga yang diperoleh. Salah satu pendekatan BPS dalam mengukur tingkat kesejahteraan, melalui penelitian penghasihan rumah tangga dengan pendekatan konsumsi (consumption approach), sehingga diperoleh indikator kesejahteraan penduduk dari data konsumsi rumah tangga, yaitu penduduk miskin, distribusi pendapatan, dan pola konsumsi rumah tangga.

Secara umum penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya (proksi pengeluaran) lebih kecil dari kebutuhan hidup layak diwilayahnya. Kebutuhan hidup layak diterjemahkan dari nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kkal/orang/hari, sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan esensial lainnya. Penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan minimal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul dalam kurun 8 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, menunjukkan trend yang terus menurun. Meskipun sempat terjadi anomali yang terjadi pada tahun 2020-2021 setelah dampak dari pandemi Covid-19, tren penurunan angka kemiskinan kembali dapat dicapai dan dipertahankan dalam dua tahun terakhir, seperti tampak dalam grafik yang kami sajikan sebagai berikut:

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (dialoh)

Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin Gunungkidul senantiasa mengalami penurunan secara konsisten. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 19,34%, tahun 2017 sebesar 18,65%, tahun 2018 sebesar 17,12%, dan tahun 2019 turun menjadi 16,61%. Kondisi nilai persentase kemandirian tingkat di tahun 2020-2021 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan target yang telah dicanangkan. Bencana non alam pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Namun kita patut bersyukur dengan dukungan semua pihak, kemiskinan tahun 2022 kembali dapat ditekan ke angka 15,86%, pada tahun 2023 turun ke angka 15,60%, dan dapat ditekan lagi angka 15,16% pada tahun 2024.

Penurunan angka kemiskinan terus senantiasa diupayakan, antara lain dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui penelatan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026. Tujuan yang ditetapkan mencakup 1) Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (dalam pemenuhan 3 layanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur); 2) Terwujudnya peningkatan ekonomi & kesejahteraan masyarakat miskin; dan 3) Terwujudnya keseluruhan kerja, pengutan kelangkaan & sumber daya manusia tm penanggulangan kemiskinan.

3. Angka Pengangguran

Berdasarkan data yang digunakan, diketahui bahwa persentase pengangguran Gunungkidul 2024 masih berada pada periode emas secara demografi. Jumlah penduduk kategori usia produktif (15 tahun sampai dengan 64 tahun) berjumlah 520.847 jiwa atau 67,04%. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding penduduk kategori usia non produktif yang tercatat 256.079 jiwa atau 32,96% dari total jumlah penduduk Gunungkidul Tahun 2024 yang tercatat sebanyak 776.926 jiwa.

Salah satu indikator penting dalam konteks ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Dengan melihat indikator TPAK dapat dilihat besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY

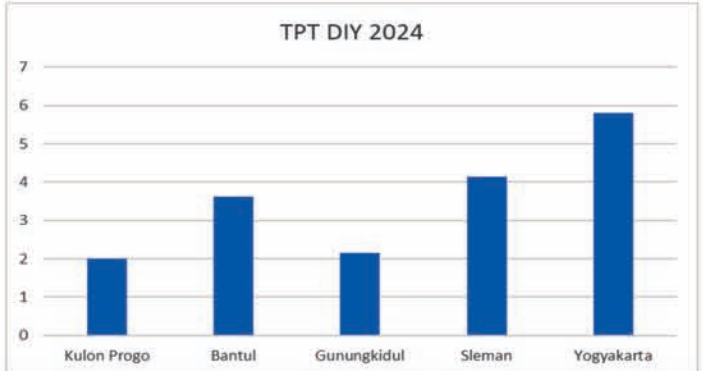
Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	77,88	76,72	78,83	75,75	78,57
Bantul	74,45	71,64	74,39	75,06	74,87
Gunungkidul	65,30	75,99	74,07	76,66	78,87
Sleman	70,51	73,05	68,12	71,18	73,27
Yogyakarta	68,62	71,86	72,48	73,20	70,56

Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 tercatat sebesar 76,87%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif di Gunungkidul, tingkat hampir 77 penduduk yang bertugas sebagai angkatan kerja. Namun penurunan maupun peningkatan TPAK belum secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) guna mengukur pengangguran. Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indeks tingkat penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah pengangguran kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2024



Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2024

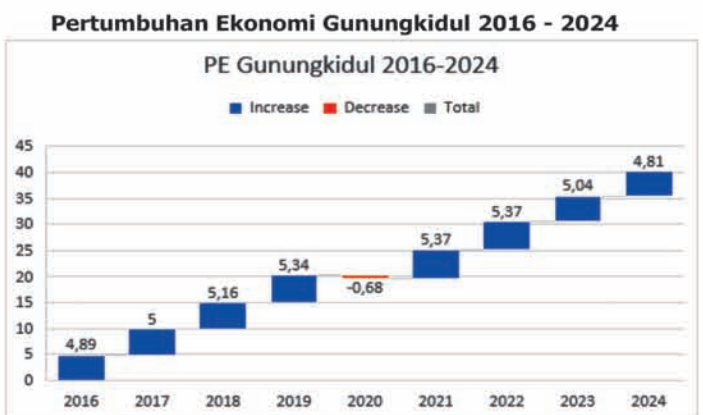
Angka TPT tertinggi di DIY terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 5,80%, diikuti Kabupaten Sleman 4,13%, Kabupaten Bantul 3,62%, dan Kabupaten Gunungkidul 2,16%, yang diikuti Kabupaten Kulonprogo 2,01%. Modal kecil berupate etos kerja yang tinggi dan daya serap lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Gunungkidul, terlebih pada sektor non formal turut mendukung rendahnya TPT di Kabupaten Gunungkidul.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencermatan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun. PDRB Gunungkidul tahun 2024 sebesar Rp24.576,31 Miliar.

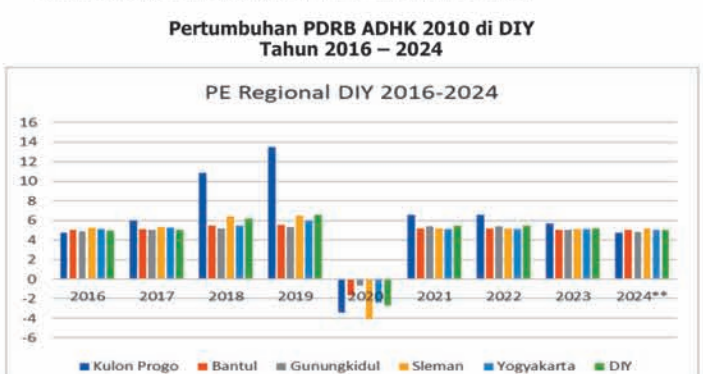
Kontribusi terbesar PDRB 2024 diberikan oleh kelompok sektor pertanian, kehutanan & perikanan yakni sebesar 24,02%, diikuti secara berturut-turut 7 besar kontributor PDRB yakni sektor konstruksi (9,21%), sektor informasi & komunikasi serta sektor perdagangan besar & eceran (8,82%), administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan (8,14%), industri pengolahan (8,36%), & sektor penyediaan akomodasi makro minimum (8,63%).

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2024 sebesar Rp16.506,42 miliar, atau naik dibanding capaian Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp15.749,22 miliar. Data PDRB ADHK yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi bertujuan mengukur pengaruh laju inflasi. Dengan data dimaksud, maka diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah 4,81%. Laju pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir:



Sumber : Data BPS, Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2024

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Gunungkidul telah mampu bangkit dari kondisi kontrol ekonomi dampak bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 dan masih dirangsang dampaknya hingga saat ini. Dari data tersebut juga menunjukkan dahsyatnya dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian wilayah. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Gunungkidul dengan karakteristik yang dimiliki menjadi wilayah paling آسیب terhadap dampak pandemi Covid-19 khususnya di wilayah DIY. Adapun gambaran secara regional laju pertumbuhan dalam kurun waktu 6 (delapan) tahun terakhir di wilayah DIY, dapat dilihat dari label berikut:



Sumber : BPS Tahun 2024

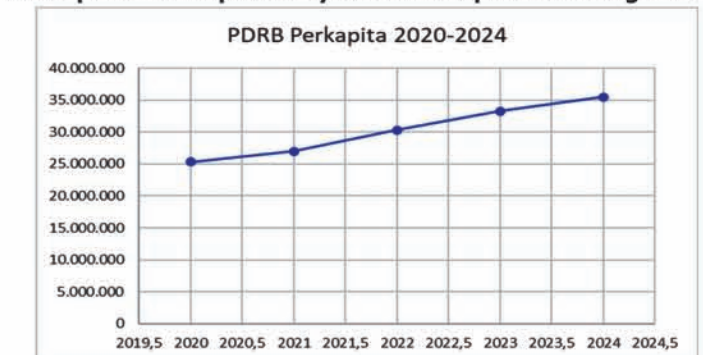
**) Angka Sangat Sementara

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai pendapatan penduduk disuatu wilayah pada periode/tahun tertentu. Terdapat dua cara menghitung pendapatan perkapita, yakni perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita nominal tanpa memperhatikan tingkat kenaikan harga atau laju inflasi. Kedua perhitungan berdasarkan harga konstan yang disebut pendapatan perkapita riil dengan memperhatikan laju inflasi.

Pada Tahun 2024 berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau pendapatan perkapita nominal Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.35.504.000,- meningkat dari kondisi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp.33.260.000,- atau meningkat 6,75%, yang mengindikasikan bahwa secara ekonomi, masyarakat telah dapat terdapat dengan kondisi new normal dampak bencana non alam pandemi Covid-19.

Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Gunungkidul



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan sebagai ukuran kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan dilakukan menggunakan data pengeluaran. Uraian yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Gini Ratio. Penentuan Gini Ratio merupakan indikator adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika semakin mendekati 0 maka tingkat pendapatan semakin merata. Gini Ratio dibagi tiga: <0,3 kategori rendah, 0,3 - 0,5 kategori moderat, dan >0,5 kategori tinggi (Oshima).

Data gini ratio 2024 pada saat tulisan ini dibuat belum dirilis oleh BPS DIY sebagai lembaga yang bawenang. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,343 (ketimpangan moderat). Data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 yang tercatat 0,316. Secara regional di DIY, nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul berada di bawah angka rata-rata DIY yang mencapai 0,449, dengan kata lain ketimpangan distribusi pendapatan di Gunungkidul lebih merata dibandingkan capaian rata-rata di DIY.



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Prioritas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keterbatasan keuangan daerah dan adanya belajar merupakan seperti dukungan Pemda. Pembangunan Pikada 2024, dan persiapan penyelenggaraan DPRD sangat berpengaruh terhadap cakupan pemenuhan pelayanan dasar. Di samping itu keterbatasan sumber daya manusia juga masih menjadi kendala dalam penerapan pelayanan dasar. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad Pemkab Gunungkidul, untuk menerapkan SPM semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1. Bidang Pendidikan

Pada Tahun 2024, pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan sebagaimana amanat Pemda Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang 3 jenis pelayanan dasar, adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini:** SPM Pendidikan Anak Usia Dini, indikatornya adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada Tahun 2024, jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah 18.671 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan PAUD adalah 16.800 anak, atau capaian SPM PAUD 2024 sebesar 98,98%.
- Pendidikan Dasar:** SPM Pendidikan Dasar memiliki indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Berdasarkan data Tahun 2024, Warga Negara Usia 7-15 tahun terdapat sebanyak 99.372 jiwa. Dari jumlah penduduk usia pendidikan dasar tersebut, sebanyak 88.132 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar baik SD/MI dan SMP/MTs. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 96,37%.
- Pendidikan Kesenjangan:** Indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk usia 7-15 tahun sasaran pendidikan kesetaraan sebanyak 2.564 orang, sedangkan jumlah partisipasi tercatat 673 orang atau sebesar 26,25%. Hal ini tidak lepas dari sulitnya melakukan pendataan warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan di luar program Dinas Pendidikan dan/atau pendidikan kesetaraan yang telah dilaksanakan dengan waktu lamu, dan masih relatif rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

2. Bidang Kesehatan

Usuran pemerintahan wajib bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, didukung Unit Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan dan Layanan RSUD Saposari, dan RSUD Wonorejo. Penerapan SPM Bidang Kesehatan untuk pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis:

- Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak:** Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2024 tercatat jumlah Ibu Hamil sebanyak 5.517 orang dan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5.127 orang, atau mencapai 92,93%.
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin:** Pada Tahun 2024, jumlah ibu bersalin sebanyak 5.517 orang dan semuanya telah mendapatkan layanan kesehatan. Sehingga capaian jumlah Ibu Bersalin yang telah mendapatkan layanan kesehatan sebesar 100%.
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir:** Indikator pencapaian ditetapkan berupa Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. Jumlah bayi baru lahir pada Tahun 2024 sebanyak 5.500 anak, dan 4.762 anak diantaranya telah mendapatkan layanan kesehatan, atau capaian pelayanan sebesar 86,58%.
- Pelayanan kesehatan balita:** Dengan jumlah Balita pada tahun 2024 sebanyak 34.688 anak dan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 30.793 anak. Sehingga capaian kinerja Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 88,78%.
- Pelayanan kesehatan orang dewasa tuberkulosis:** Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2024 sebesar 100%, dengan rincian jumlah warga negara usia pendidikan dasar sebanyak 81.395 orang dan seluruhnya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif:** Pada Tahun 2024, Jumlah Warga Negara usia produktif yang harus mendapatkan pelayanan sebanyak 466.051 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebesar 249.032 orang. Sehingga Jumlah Warga usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan tercatat sebesar 53,43%.
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut:** Jumlah Warga Negara usia lanjut Tahun 2024 yang harus dilayani mencapai 81.633 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 63.239 orang. Sehingga Jumlah warga usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan telah mencapai sebesar 77,47%.
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi:** Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2024 tercatat sebesar 35,79%. Yakni dari 32.008 orang penderita hipertensi, yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 11.466 orang.
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus:** Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2024 tercatat sebesar 47,06%. Dengan rincian dari 10.329 orang penderita diabetes melitus, yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.861 orang.

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat:

Jumlah Warga Negara, tercatat sebanyak 1.652 orang mengalami gangguan jiwa berat dan 1.258 diantaranya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sehingga pencapaian SPM pelayanan terhadap Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatannya terrealisasi sebesar 76,15%.

Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis:

Di wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 tercatat ada 6.948 warga terduga tuberkulosis. Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.135 orang, atau dengan capaian kinerja sebesar 73,91%.

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melambakan daya tahan tubuh manusia (HIV) pada Tahun 2024 sebanyak 6.644 orang yang telah mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.141 orang. Sehingga pemenuhan SPM nya mencapai 92,43%.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan, pada tanggal 8 Agustus 2024, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap komitmen penerapan universal health coverage/UHC, karena telah melampaui cakupan capaian minimal 95% JKN (jaminan kesehatan nasional) terhadap total jumlah penduduk, dan keberhasilan menginisiasi program Jemkesda ke dalam program JKN. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. UHC mengandung 2 elemen, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, serta perlindungan risiko finansial terhadap warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan terhadap komitmen dimaksud. Kabupaten Gunungkidul sebagai penerima penghargaan cakupan capaian minimal 95% peserta JKN dari total jumlah penduduk, serta pengintegrasian program Jemkesda ke dalam program JKN.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Usuran pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTTR). Jenis SPM bidang ini meliputi:

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari:** Dalam upaya penerapan SPM ini, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan kegiatan Pemukiman, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah. Berdasarkan data Tahun 2024 tercatat sebanyak 262.751 rumah tangga, dan yang sudah terlayani kebutuhan pokok air minumannya mencapai 238.124 rumah tangga, atau capaian SPM ini mencapai 90,83%.
- Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air limbah Domestik:** Penerapan dan pemenuhan SPM Pengelolaan air limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, terrealisasi 92,11%. Dengan jumlah rumah yang telah memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 232.823 rumah tangga dari total sebanyak 252.770 rumah yang ada.

4. Bidang Pemukiman dan Kawasan Permukiman

Usun wajib di Bidang Pemukiman dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTTR). Jenis SPM bidang ini meliputi:

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari:** Dalam upaya penerapan SPM ini, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan kegiatan Pemukiman, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah. Berdasarkan data Tahun 2024 tercatat sebanyak 262.751 rumah tangga, dan yang sudah terlayani kebutuhan pokok air minumannya mencapai 238.124 rumah tangga, atau capaian SPM ini mencapai 90,83%.
- Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air limbah Domestik:** Penerapan dan pemenuhan SPM Pengelolaan air limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, terrealisasi 92,11%. Dengan jumlah rumah yang telah memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 232.823 rumah tangga dari total sebanyak 252.770 rumah yang ada.

(DPUPRKP). Adapun jenis pelayanan dasarnya ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana:** Dalam pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, sepanjang tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat warga terdampak bencana yang memerlukan penyediaan atau rehabilitasi rumah.
- Facilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah:** Pada Tahun 2024, di wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat program pemerintah yang menggunakan mekanisme bantuan mengakhiri relokasi rumah warga masyarakat. Sehingga sepanjang tahun tidak terdapat warga masyarakat memerlukan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

5. Bidang Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Di Gunungkidul, urusan wajib bidang ketertaman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni sub urusan bencana dan ketertaman. Adapun jenis SPM bidang ini meliputi:

- Pelayanan ketertaman dan ketertiban umum:** Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akses dari penekang hukum Perda dan Perkada, pada Tahun 2024 capaian pelayannya terrealisasi sebesar 100%. Berdasarkan data SatPolPP terdapat 55 orang warga terdampak akan hukuman penjara karena pelanggaran hukum, dan semuanya telah memperoleh pelayanan sesuai standar.
- Pelayanan informasi rawan bencana:** Pada Tahun 2024, di wilayah Gunungkidul tercatat 774.441 jiwa warga yang tersebar di 18 kapawenang, yang berhak menerima layanan informasi rawan bencana. Informasi rawan bencana disampaikan secara daring melalui jejaring Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dibantu setiap tahun 2012 sampai tahun 2024 terhadap seluruh kalurahan yang masuk kategori rawan bencana. Sehingga, pencapaian parameter pelayanan informasi rawan bencana dapat terrealisasi 100%.

- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai indikator pencapaian terrealisasi 100%. Yakni pelayanan dilakukan terhadap 487.216 jiwa warga yang berhak menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terintegrasi dalam program Destana, melalui pelatihan terhadap 25.601 orang petugas desa.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyaluran dan evaluasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terrealisasi 100%.
- Pelayanan penyaluran dan evaluasi korban bencana:** Indikator Jumlah Warga Negara yang